

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pemekaran daerah terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada studi kasus dua dekade pemekaran Kabupaten Ogan Ilir. Kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan indikator makro berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kemudian capaian tersebut akan dijelaskan melalui kapabilitas sistem politik ekstraktif, yaitu kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri, serta distributif terkait dengan bagaimana daerah mendistribusikan input tersebut kepada masyarakat melalui pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor kritis dalam membentuk nilai IPM.

Dalam penelitian ini, capaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi atau situasi di daerah hasil pemekaran lainnya dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik kewilayahan, faktor sosial-ekonomi, dan rentang waktu pemekaran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 di ketiga wilayah tersebut.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan melibatkan analisis data sekunder dan primer, termasuk wawancara, data ekonomi, sosial, dan kebijakan terkait pemekaran. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan pemekaran dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implikasi temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pemekaran daerah di masa depan, sambil memberikan wawasan lebih lanjut dalam konteks pengembangan wilayah.

Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Desentralisasi

ABSTRACT

This research aims to evaluate the impact of territorial split policies on efforts to improve public welfare, focusing on a case study of two decades of the splits in Ogan Ilir District. Public welfare is measured based on macro indicators such as the Human Development Index (HDI). The achievements will be explained through the capabilities of the extractive political system, specifically the region's ability to generate income independently and distributively in terms of how the region distributes these inputs to the public through public services such as education and health, which are critical factors in shaping the HDI.

In this study, the achievements of public welfare in Ogan Ilir will be compared with Ogan Komering Ulu Timur and Ogan Komering Ulu Selatan. This comparison aims to understand the conditions or situations in other areas that have undergone territorial splits, considering the similarity of regional characteristics, socio-economic factors, and the period of splits regulated by Law Number 37 of 2003 in these three regions.

This research utilizes a qualitative method involving secondary and primary data analysis, including interviews, economic data, social data, and policies related to territorial split. The evaluation results are expected to provide a profound understanding of territorial split policies' effectiveness in improving public welfare. The implications of the research findings are expected to contribute to formulating future policies related to territorial splits while providing further insights in the context of regional development.

Keywords: Territorial Split, Public Welfare, Decentralization